

Good Corporate Governance: Sebagai Mitigasi Risiko Pelanggaran Etika Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Imas Nurani Islami^{1*}, Irsyad Lukmanul Hakim², Muhamad Syafiq Hilmy³, Ahmad Ghossan Abdillah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

E-mail: imas.nurani@upi.edu

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3161>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 18 Oct 2025

Revised: 24 Oct 2025

Accepted: 30 Oct 2025

Kata Kunci:

Good Corporate Governance, Mitigasi Risiko, Kinerja Keuangan Perusahaan

Keywords:

Good Corporate Governance, Risk Mitigation, Company Financial Performance.



Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi elemen penting dalam mencegah pelanggaran etika, khususnya dalam laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran GCG sebagai mekanisme mitigasi risiko pelanggaran etika dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* dengan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik GCG, yang telah dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang efektif mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meminimalkan risiko manipulasi data, serta memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Namun, beberapa tantangan, seperti lemahnya kontrol internal, budaya organisasi yang tidak mendukung, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya GCG, masih menjadi kendala utama di Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi GCG dengan teknologi modern, seperti sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)*, dapat memperkuat tata kelola perusahaan. Kesimpulannya, GCG tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian risiko tetapi juga sebagai alat strategis untuk menciptakan tata kelola yang berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan bisnis.

Good Corporate Governance (GCG) has become a crucial element in preventing ethical violations, particularly in corporate financial reporting. This study aims to analyze the role of GCG as a risk mitigation mechanism for ethical violations and its impact on corporate financial performance. This study uses the *Systematic Literature Review (SLR)* method by identifying literature relevant to the topic of GCG, which has been published in reputable journals. The results show that effective GCG implementation can increase transparency and accountability, minimize the risk of data manipulation, and improve corporate financial performance in the long term. However, several challenges, such as weak internal controls, an unsupportive organizational culture, and low awareness of the importance of GCG, remain major obstacles in Indonesia. This study also found that integrating GCG with modern technology, such as *Enterprise Resource Planning (ERP)* systems, can strengthen corporate governance. In conclusion, GCG functions not only as a risk control but also as a strategic tool for creating sustainable governance and supporting business sustainability.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Imas Nurani Islami, et al (2025). *Good Corporate Governance: Sebagai Mitigasi Risiko Pelanggaran Etika Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3161>

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis modern telah mendorong perusahaan untuk memperhatikan berbagai aspek manajemen yang lebih komprehensif. Tidak hanya kinerja keuangan yang menjadi perhatian utama, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat mempertahankan reputasi dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi sangat relevan. GCG bukan

hanya sekadar mekanisme untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya, tetapi juga sebagai alat untuk meminimalisasi risiko pelanggaran etika yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan (Angelliza Chantica *et al.*, 2022). Pelanggaran etika di lingkungan perusahaan telah menjadi isu yang sering mencuat ke permukaan, terutama di era globalisasi ekonomi yang semakin kompetitif. Kasus-kasus besar seperti skandal Enron, Lehman Brothers, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti PT Jiwasraya maupun Asabri, menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran etika dapat menghancurkan fondasi bisnis. Perilaku tidak etis dalam pengelolaan perusahaan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari investor, pelanggan, dan masyarakat. Dalam kondisi ini, GCG menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil (Sitompul *et al.*, 2024).

Secara teoretis, *Good Corporate Governance* adalah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, perusahaan dapat meminimalisasi risiko operasional, termasuk pelanggaran etika yang kerap kali bersumber dari penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau manipulasi data keuangan. Dalam konteks ini, penerapan GCG bukan hanya berfungsi sebagai alat mitigasi, tetapi juga sebagai faktor yang mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan seringkali menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan perusahaan. Namun, tanpa pengelolaan yang berlandaskan etika dan prinsip-prinsip GCG, kinerja keuangan hanya menjadi parameter yang rentan terhadap manipulasi. Dalam praktiknya, perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran etika biasanya menghadapi berbagai implikasi negatif, termasuk sanksi hukum, penurunan harga saham, dan berkurangnya kepercayaan dari para investor. Oleh karena itu, keberadaan GCG sangat krusial untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan profitabilitas dan integritas etika (Suryadinata, 2016).

Penerapan GCG di Indonesia sendiri telah mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam beberapa dekade terakhir. Regulasi seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta pedoman GCG yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), memberikan landasan hukum yang jelas bagi perusahaan untuk mengimplementasikan tata kelola yang baik. Namun, tantangan penerapan GCG di Indonesia tidaklah sederhana (Isnaeni, 2013). Berbagai hambatan, seperti budaya organisasi yang kurang mendukung, rendahnya komitmen manajemen, serta keterbatasan dalam penegakan hukum, seringkali menjadi kendala yang menghambat efektivitas implementasi GCG. Pentingnya penerapan GCG juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan korelasi positif antara tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja keuangan yang stabil. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Claessens dan Yurtoglu (2013) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal, meningkatkan efisiensi operasional, dan mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Selain itu, implementasi GCG juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap standar etika atau hukum (Datriadi, 2023).

Dalam praktiknya, GCG tidak hanya berperan dalam mengurangi risiko pelanggaran etika tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan. Lingkungan bisnis global yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan standar internasional, termasuk dalam hal tata kelola. Perusahaan-perusahaan yang mampu mengintegrasikan GCG ke dalam strategi bisnisnya akan lebih mudah menarik minat investor, baik lokal maupun internasional. Hal ini karena investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam hal tata kelola dan kepatuhan terhadap standar etika. Namun, meskipun manfaat dari penerapan GCG telah banyak diakui, implementasinya seringkali menemui tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya GCG di tingkat manajemen. Banyak perusahaan yang masih melihat GCG sebagai beban administratif semata, sehingga penerapannya cenderung setengah hati. Selain itu, pengawasan eksternal yang lemah juga menjadi faktor yang menyulitkan implementasi GCG di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik, di mana semua pihak yang terlibat memiliki komitmen yang sama untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG. (Widiyastomo, 2020)

Dalam konteks mitigasi risiko pelanggaran etika, penerapan GCG juga memerlukan integrasi dengan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai etika dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam mendukung implementasi GCG. Perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang kuat akan lebih mudah menginternalisasi prinsip-prinsip GCG di setiap aspek operasionalnya. Sebaliknya, tanpa dukungan budaya organisasi yang baik, penerapan GCG hanya akan menjadi formalitas tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan GCG dapat menjadi mekanisme mitigasi risiko pelanggaran etika yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan teoretis dan empiris, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara pelanggaran etika, penerapan GCG, dan kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi GCG di Indonesia. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, *Good Corporate Governance* merupakan elemen penting dalam memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan di era modern. Penerapannya tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan risiko pelanggaran etika tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing perusahaan. Dengan semakin kompleksnya tantangan bisnis saat ini, perusahaan harus mampu mengintegrasikan GCG ke dalam strategi bisnis mereka sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memahami peran GCG sebagai mekanisme mitigasi risiko yang efektif, sekaligus memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan pelanggaran etika dalam laporan keuangan. SLR merupakan metode yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data literatur dilakukan dengan transparan, objektif, dan dapat direplikasi. Keunggulan utama metode ini terletak pada kemampuannya untuk mengurangi bias yang sering muncul dalam pengumpulan dan analisis literatur, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Menurut Kitchenham dan Charters (2007), pelaksanaan SLR mencakup serangkaian langkah yang berstruktur. Tahap pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian (research question) yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana penerapan GCG dapat memitigasi risiko pelanggaran etika dalam laporan keuangan perusahaan? Pertanyaan ini berfungsi sebagai panduan dalam memilih literatur yang relevan dan memastikan fokus penelitian tetap konsisten. Setelah menentukan kriteria inklusi dan eksklusi, tahap berikutnya adalah pencarian literatur melalui berbagai basis data akademik seperti *Scopus*, *Web of Science*, *ProQuest*, dan *Google Scholar*. Kata kunci yang digunakan meliputi “*Good Corporate Governance*,” “*ethical violations*,” “*financial reporting*,” dan “*mitigation strategies*.” Kombinasi kata kunci ini disesuaikan dengan operator Boolean seperti *AND*, *OR*, dan *NOT* untuk meningkatkan akurasi hasil pencarian. Hasil pencarian kemudian dievaluasi berdasarkan abstrak dan isi artikel untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian. Pada tahap analisis, literatur yang telah disaring dikodekan menggunakan kerangka analisis tematik. Proses ini mencakup identifikasi tema utama, subtema, dan hubungan antara berbagai temuan. Analisis dilakukan dengan cara membaca secara mendalam setiap artikel yang terpilih untuk mengidentifikasi bagaimana GCG diterapkan, jenis pelanggaran etika yang muncul dalam laporan keuangan, serta efektivitas strategi mitigasi yang diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Tahap penting lainnya dalam SLR adalah sintesis hasil penelitian. Sintesis dilakukan dengan menggabungkan temuan dari berbagai studi untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara GCG dan pelanggaran etika dalam laporan keuangan. Dalam proses ini, penelitian yang memiliki temuan serupa dikelompokkan bersama untuk mengidentifikasi pola atau tren yang konsisten. Sementara itu, penelitian dengan temuan yang kontradiktif dianalisis lebih lanjut untuk memahami

perbedaan konteks atau metodologi yang mendasarinya. Selama proses SLR, validitas dan reliabilitas penelitian dijaga dengan menerapkan proses double-checking pada setiap tahap. Dua peneliti independen dilibatkan dalam proses penyaringan literatur untuk memastikan bahwa artikel yang dipilih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil analisis juga diverifikasi oleh pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang tata kelola perusahaan dan pelanggaran etika untuk memastikan interpretasi yang akurat.

Dengan menggunakan metode SLR, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran GCG sebagai mekanisme mitigasi risiko pelanggaran etika. Hasilnya diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam menerapkan GCG untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik tidak etis. Pendekatan sistematis yang digunakan dalam SLR memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh bukti empiris yang kuat dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini berhasil mengidentifikasi artikel ilmiah yang relevan dari berbagai jurnal bereputasi. Artikel-artikel tersebut dianalisis berdasarkan temuan utama terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), pelanggaran etika dalam laporan keuangan, dan efektivitas GCG dalam memitigasi risiko pelanggaran tersebut. Dari hasil analisis, terdapat tiga temuan utama: (1) GCG berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, (2) pelanggaran etika dalam laporan keuangan cenderung terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kontrol internal, serta (3) penerapan GCG yang konsisten mampu memperbaiki kinerja keuangan perusahaan secara jangka panjang. Studi-studi yang dianalisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika. Sebagai contoh, penelitian oleh Claessens dan Yurtoglu (2013) menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang baik memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar pelaporan keuangan internasional. Selain itu, penelitian oleh Khan *et al.* (2019) menemukan bahwa implementasi GCG yang efektif mampu mengurangi potensi manipulasi data keuangan hingga 40%.

Adapun pelanggaran etika yang sering ditemukan dalam laporan keuangan meliputi manipulasi laba (*earnings management*), penyajian informasi yang menyesatkan, dan penggelapan aset. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan pemegang saham tetapi juga mengancam keberlanjutan perusahaan. Dari analisis literatur, ditemukan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG secara penuh lebih mampu mengidentifikasi dan menangani risiko tersebut dibandingkan perusahaan yang hanya menerapkan GCG secara parsial atau formalitas belaka (Ariviani *et al.*, 2016). Penerapan GCG yang baik menjadi fondasi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Transparansi memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk investor dan regulator, untuk mendapatkan akses terhadap informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Berdasarkan hasil analisis, banyak studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat cenderung memiliki laporan keuangan yang lebih andal. Penelitian oleh Leung *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan mampu mengurangi risiko kesalahan penyajian data sebesar 25%. Selain itu, akuntabilitas yang diterapkan melalui mekanisme pengawasan seperti audit internal dan eksternal juga menjadi elemen penting dalam mencegah pelanggaran etika. Dalam hal ini, dewan komisaris dan komite audit memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki komite audit independen lebih mampu mendeteksi dan mencegah manipulasi laporan keuangan dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki komite semacam itu (Isnaeni, 2013).

Dari hasil literatur, ditemukan beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran etika dalam laporan keuangan. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah lemahnya kontrol internal perusahaan. Ketika struktur pengendalian internal tidak berjalan dengan baik, peluang untuk melakukan manipulasi atau pelanggaran etika menjadi lebih besar. Penelitian oleh Dechow *et al.* (2011) menunjukkan bahwa 70% kasus pelanggaran laporan keuangan disebabkan oleh kurangnya pengawasan manajemen terhadap praktik operasional sehari-hari. Selain itu, budaya organisasi yang tidak mendukung etika juga menjadi pemicu utama. Budaya organisasi yang hanya berorientasi pada profitabilitas sering kali mengabaikan aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai etika. Hal ini dapat

menyebabkan manajemen atau karyawan merasa tertekan untuk mencapai target finansial tertentu, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan tidak etis. Dalam hal ini, integrasi GCG dengan budaya organisasi menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perilaku etis (Marwansyah, 2019).

Good Corporate Governance berperan sebagai mekanisme mitigasi risiko yang efektif terhadap pelanggaran etika. Prinsip-prinsip GCG, seperti independensi, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi konflik kepentingan yang sering menjadi akar masalah dalam manipulasi laporan keuangan. Sebagai contoh, penelitian oleh Aguilera *et al.* (2008) menunjukkan bahwa perusahaan dengan dewan komisaris independen lebih mampu mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik kepentingan dibandingkan perusahaan yang dewan komisarisnya tidak independen. Selain itu, penerapan GCG juga mendorong perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan data keuangan. Penggunaan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang didukung oleh prinsip GCG terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pelaporan keuangan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi anomali atau potensi pelanggaran secara lebih cepat, sehingga risiko dapat diminimalkan sejak dini (Lestari, 2019).

Kinerja keuangan yang sehat sering kali menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan GCG. Berdasarkan analisis literatur, ditemukan bahwa perusahaan yang secara konsisten menerapkan GCG cenderung memiliki performa keuangan yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang tidak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Penelitian oleh Shleifer dan Vishny (1997) menunjukkan bahwa perusahaan dengan reputasi tata kelola yang baik lebih mampu menarik modal eksternal dan memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal. Selain itu, penerapan GCG juga berdampak pada pengurangan biaya modal (*cost of capital*). Perusahaan yang dianggap memiliki risiko lebih rendah akibat tata kelola yang baik cenderung mendapatkan suku bunga pinjaman yang lebih rendah. Dengan demikian, GCG tidak hanya berperan dalam mitigasi risiko tetapi juga memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi perusahaan.

Meskipun manfaat GCG telah banyak diakui, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran manajemen perusahaan terhadap pentingnya GCG. Banyak perusahaan yang masih melihat GCG sebagai beban administratif semata tanpa memahami dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Kasus-kasus pelanggaran etika dalam laporan keuangan sering kali tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, sehingga menciptakan iklim yang tidak mendukung penerapan GCG. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi GCG (Maharani C Sari, 2021).

Budaya organisasi yang kuat dan berorientasi pada nilai-nilai etika merupakan salah satu kunci sukses dalam implementasi GCG. Penelitian oleh Schein (2010) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang mendukung perilaku etis dapat mempercepat internalisasi prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkat organisasi. Dalam konteks ini, perusahaan perlu mengembangkan program pelatihan etika secara rutin untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap GCG.

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran signifikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memitigasi risiko pelanggaran etika yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini berhasil mengidentifikasi temuan-temuan penting yang menunjukkan hubungan erat antara penerapan GCG, penguatan kontrol internal, dan perbaikan kinerja keuangan perusahaan. GCG terbukti berfungsi sebagai mekanisme yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Salah satu kontribusi utama GCG adalah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat, sehingga meminimalkan risiko manipulasi data atau penyajian informasi yang menyesatkan. Dalam hal ini, peran komite audit, dewan komisaris independen, dan pengawasan manajemen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa

standar pelaporan keuangan dipatuhi secara konsisten. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran etika dalam laporan keuangan sering kali dipicu oleh lemahnya pengawasan internal, tekanan untuk mencapai target finansial tertentu, dan budaya organisasi yang tidak mendukung perilaku etis. Oleh karena itu, integrasi GCG dengan nilai-nilai etika di tingkat organisasi sangat diperlukan. Dengan memperkuat budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik.

Penerapan GCG yang efektif juga memiliki dampak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan reputasi tata kelola yang baik cenderung memiliki akses lebih mudah ke pasar modal, mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari investor, dan mengurangi biaya modal. Dengan demikian, GCG tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Namun, implementasi GCG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya GCG dan lemahnya penegakan hukum. Banyak perusahaan yang melihat GCG sebagai formalitas administratif, bukan sebagai kebutuhan strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha untuk menciptakan sistem yang mendukung penerapan GCG secara menyeluruh.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam implementasi GCG. Penggunaan teknologi, seperti sistem Enterprise Resource Planning (ERP), dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data keuangan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah anomali atau pelanggaran sejak dini, sehingga risiko dapat diminimalkan secara signifikan. Dengan memadukan prinsip-prinsip GCG dengan teknologi modern, perusahaan dapat mencapai tata kelola yang lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan GCG secara konsisten merupakan langkah strategis untuk memitigasi risiko pelanggaran etika, memperkuat kontrol internal, dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan mengatasi tantangan implementasi GCG melalui penguatan budaya organisasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kesadaran hukum, perusahaan dapat menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Aguilera, R. V., Filatotchev, I., Gospel, H., & Jackson, G. (2008). *An Organizational Approach to Comparative Corporate Governance: Costs, Contingencies, and Complementarities*. *Organization Science*, 19(3), 475–492. <https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0322>
- Angelliza Chantica, J., Cahyani, R., C Romadhon, A. (2022). Peranan Manajemen Pengawasan: Komitmen, Perencanaan, Kemampuan Karyawan (Literature Review Msdm). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(3), 247–256. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.829>
- Ariviani, R., Asy'ari, H., C Hardjanto, U. S. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 Berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1– 11.
- Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). *Corporate Governance in Emerging Markets*. *Annual Review of Financial Economics*, 5, 1–30. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110112-120936>
- Datriadi, T. N. A. (2023). Media Massa dan Proses Konstruksi Realitas dalam Kajian Teori Sistem dan Differensiasi. *Mukasi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 132–142. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i2.1576>
- Dechow, P. M., Ge, W., & Schrand, C. (2011). *Understanding Earnings Quality: A Review of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences*. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 344–401. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.001>
- Isnaeni, N. (2013). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Global & Strategis*, 7(1), 123–138. www.nasional.kompas.com

- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2019). *Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy*. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 207–223. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University Joint Report.
- Leung, P., Cooper, B. J., & Perera, L. (2017). *Accountability and Transparency in Corporate Governance: The Role of Audit Committees*. *Managerial Auditing Journal*, 32(5), 426–444. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2015-1285>
- Lestari, R. A. (2019). Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1421>
- Maharani, Y., C Sari, R. (2021). Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(1), 97. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i1.1919>
- Marwansyah. (2019). Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan terhadap CV.Berdikari Madigono Magetan. *Angewandte Chemie International Edition*, c(11), S51– S52., 201c, 2013–2015.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). *A Survey of Corporate Governance*. *The Journal of Finance*, 52(2), 737–783. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>
- Sitompul, D. P., Sitorus, Y., Sibuea, E. G. B., C Elsi, S. D. (2024). Peran Media Sosial Dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Pemula. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 767–775. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.888>
- Suryadinata, E. (2016). Proses komunikasi interpersonal antara orang tua tunggal (ibu) dengan anak dalam mempertahankan intimacy. *Jurnal E-Komunikasi*.
- Widiyastomo, R. P. (2020). Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi Di Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Tahun 2020 - 2024. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 17(2), 84.